

BAB I

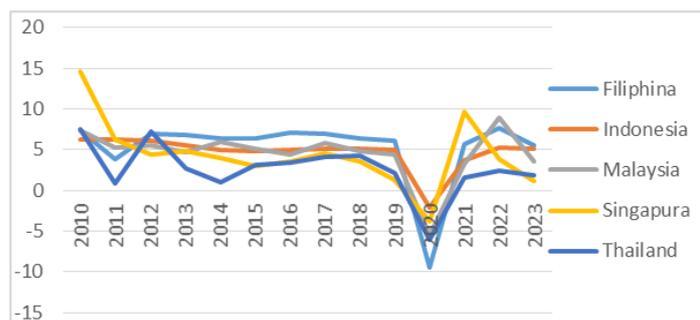
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah memiliki peran krusial sebagai penggerak utama. Pemerintah memainkan peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan dan menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kemajuan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan kemunduran (Lucya & Anis, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, khususnya dalam menilai hasil dari proses pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Jika produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perekonomian dapat dianggap berkembang (Kharazi & Nuraini, 2024). Indikator ini menggambarkan seberapa besar aktivitas ekonomi mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu yang menandakan adanya kemajuan yang signifikan dalam perekonomian suatu negara atau wilayah. Negara-negara berkembang, termasuk yang ada di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina (ASEAN-5) terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan strategi (Fakhrizal et al., 2023).

Negara-negara ASEAN-5 memiliki karakteristik ekonomi dan politik yang berbeda yang memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana stabilitas politik dapat mempengaruhi hubungan antara FDI, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Singapura adalah negara dengan ekonomi yang sangat terbuka dan stabil secara politik yang memiliki daya tarik besar bagi investor asing. Singapura menjadi contoh negara dengan hubungan FDI yang kuat dan stabilitas politik yang tinggi. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN memiliki tantangan besar dalam hal kestabilan politik, tetapi memiliki potensi besar dalam menarik FDI dan memanfaatkan pengeluaran pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. FDI di Indonesia masih terhalang oleh proses birokrasi yang rumit dikarenakan politik yang tidak stabil. Malaysia dan Thailand juga memiliki karakteristik ekonomi yang serupa tetapi perbedaan dalam stabilitas politik (terutama di Thailand) dapat memengaruhi sejauh mana kebijakan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Chandana et al., 2020).



Sumber: *World Bank*

Gambar 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi 5 negara ASEAN tahun 2010-2023 (dalam satuan persen)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas pertumbuhan ekonomi di lima negara pendiri ASEAN menunjukkan tren yang cenderung serupa mengalami

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meskipun tingkat pertumbuhannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Thailand menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tidak stabil di antara negara-negara tersebut. Selain penurunan tajam akibat pandemi covid-19, Thailand sempat mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, yaitu di bawah 1% pada tahun 2011 (0,8%) dan 2014 (0,9%). Hal ini menjadikan Thailand sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terlambat di antara kelima negara lainnya periode 2010-2023. Thailand juga menghadapi kesulitan besar dalam masa pemulihan pasca-covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1,5%. Di sisi lain, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Filipina tercatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara empat negara lainnya. Namun, Filipina juga menghadapi tantangan berat pada masa pandemi yang terlihat dari kontraksi ekonomi yang mencapai -9,5% pada tahun 2020. Malaysia dan Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang periode 2010-2023. Indonesia mampu mengatasi dampak covid-19 dengan lebih baik terbukti dari penurunan ekonomi yang relatif ringan pada tahun 2020 yaitu hanya -2%. Kemudian Singapura, meskipun memiliki luas wilayah yang sangat kecil namun menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Sebagai satu-satunya negara maju di kawasan ini, Singapura tidak mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi namun kinerjanya tetap impresif mengingat tingkat ekonomi yang sudah sangat tinggi. Di antara negara-negara ASEAN, Singapura memiliki pertumbuhan

pasca-covid-19 yang cukup signifikan, mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 9,6% pada 2021 yang mencerminkan daya tahan dan ketangguhan ekonominya.

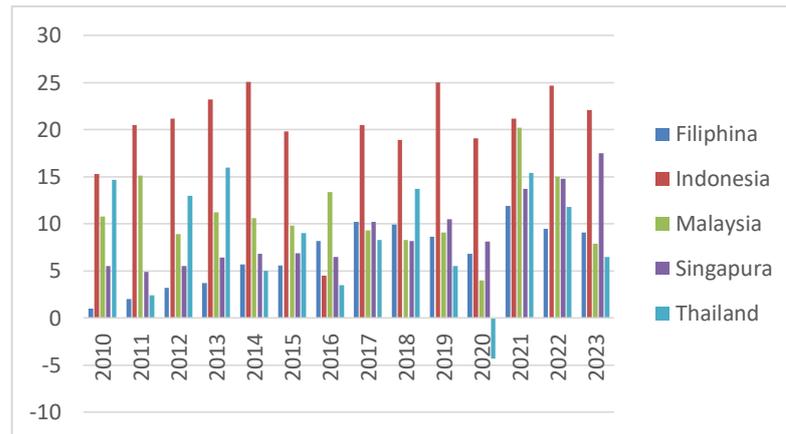
Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan hal ini menjadi indikator positif bahwa perekonomian tersebut berkembang dengan baik. Kondisi tersebut biasanya menggambarkan adanya pengelolaan ekonomi yang efektif, penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak, serta peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum (R. R. Manullang et al., 2024). Studi empiris seperti yang dilakukan oleh Knotek (2017) menegaskan bahwa hubungan ini dapat bersifat dinamis dan berubah tergantung pada konteks waktu dan lokasi geografis.

Teori pertumbuhan Neo Klasik (Solow-Swan Model) menyatakan bahwa persediaan modal, angkatan kerja, dan teknologi digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), dan teknologi (*technology*). FDI memainkan peran penting sebagai salah satu sumber utama modal fisik yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi baru (Asnawi et al., 2023). Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor kesehatan yang akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan efisiensi ekonomi (Awaliyah Matondang et al., 2024). Pengeluaran pemerintah yang efisien

akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk menarik lebih banyak FDI serta memastikan bahwa modal yang masuk dapat dimanfaatkan secara maksimal.

FDI dan pengeluaran pemerintah telah lama diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Namun, efektivitas kedua faktor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh stabilitas politik yang ada di setiap negara (Jubir et al., 2023). Keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada negara tersebut. Untuk mencapai semua itu, diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendistribusian dana. Pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik dan optimal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik merupakan sesuatu yang harus dicapai oleh setiap negara. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. FDI tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sektor-sektor produktif, tetapi juga menjadi saluran penting bagi pertukaran teknologi, pengetahuan, dan praktik manajerial modern (Mubarak AS & Ibnu Muhdar, 2023). Perusahaan asing yang berinvestasi melalui FDI umumnya membawa teknologi canggih yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memperkuat kapasitas teknologi negara penerima investasi. Selain itu, FDI mendorong perusahaan domestik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk guna tetap bersaing yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Melalui berbagai keuntungan tersebut, FDI memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi

dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarak AS & Ibnu Muhdhir (2023) dimana investasi asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber: *World Bank*

Gambar 1. 2

Investasi Asing Langsung 5 Negara ASEAN 2010-2023 (dalam satuan Miliar USD)

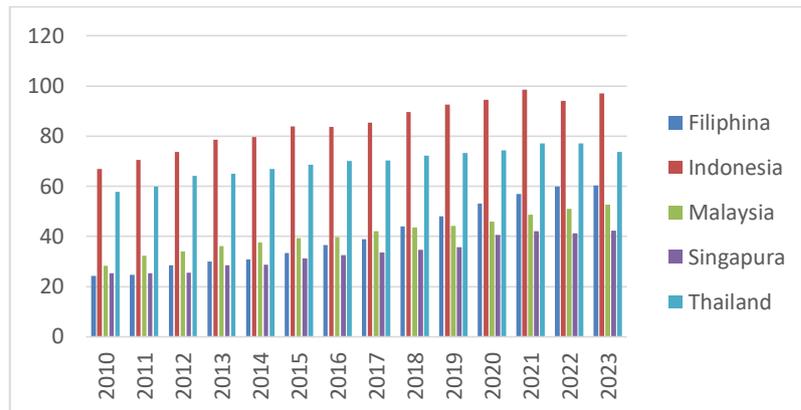
Berdasarkan gambar 1.2 Indonesia menjadi negara dengan penerimaan investasi asing langsung terbanyak dengan rata-rata penerimaan sebanyak 20 miliar USD dengan capaian tertingginya pada tahun 2014 dengan 25,1 miliar USD investasi masuk ke Indonesia. Filipina menjadi negara dengan investasi langsung terendah dengan rata-rata 6,8 miliar USD per tahun. Pada tahun 2020 Thailand mengalami penurunan signifikan dalam arus masuk investasi asing akibat dampak dari pandemi COVID-19. Di mana pada tahun tersebut Thailand mengalami penarikan kembali investasi sebesar 4,1 miliar USD (Trading Economics, 2024).

Pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara baik pengeluaran di tingkat pusat maupun daerah memiliki potensi untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Hal ini sesuai dengan hasil yang diteliti oleh Jubir (2023) dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara umum pertumbuhan ekonomi cenderung menurun ketika pengeluaran pemerintah rendah, namun pengeluaran yang seimbang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pemerintah melakukan pengeluaran secara berlebihan hal tersebut bisa menghambat pertumbuhan ekonomi (Helmiyanti & Khoirudin, 2024). Ketika pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk investasi publik seperti dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, hal ini memiliki potensi besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran berperan dalam mendorong pengembangan sektor-sektor strategis yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang, seperti riset dan pengembangan (R&D). Investasi dalam bidang ini sangat penting untuk mendorong inovasi teknologi yang akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing negara di pasar global. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah yang terfokus pada sektor-sektor vital ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan landasan yang kuat untuk keberlanjutan dan kemajuan ekonomi di masa depan (Manajemen et al., 2025).



Sumber: *World Bank*

Gambar 1. 3

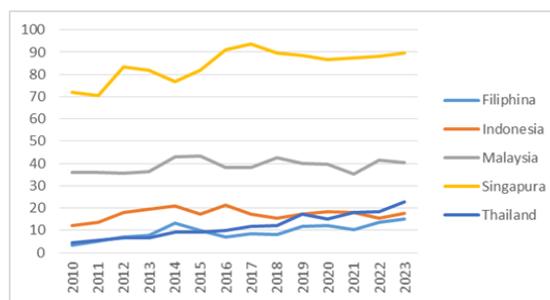
Pengeluaran Pemerintah 5 Negara ASEAN tahun 2010-2023 (dalam satuan Miliar USD)

Berdasarkan gambar 1.3 Indonesia menjadi negara dengan pengeluaran pemerintah tertinggi dengan rata-rata 84,9 miliar USD dikeluarkan pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh wilayah yang luas dan FDI tertinggi diantara ke limanya. Singapura dengan wilayah terkecil juga menjadi negara dengan pengeluaran pemerintah terkecil, dengan rata-rata 33,4 miliar USD dikeluarkan per tahunnya.

Di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya telah berkontribusi pada peningkatan daya saing dan diversifikasi ekonomi. Sementara itu, Singapura telah menggunakan kebijakan pengeluaran yang efisien untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan Filipina berfokus pada pengeluaran sosial dan bantuan pada sektor-sektor yang terdampak krisis. Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal itu sendiri, tetapi juga pada faktor eksternal yang mempengaruhi implementasinya. Salah satunya adalah stabilitas politik yang berperan sebagai variabel intervening yang dapat memperkuat atau mengurangi

dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Nurhasanah, 2022).

Stabilitas politik suatu negara memiliki peran penting dalam memperkuat pengaruh bantuan luar negeri dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik mengacu pada keadaan politik yang terjaga dimana pemerintah dan lembaga negara berfungsi dengan baik tanpa terganggu oleh kerusuhan sosial atau kekerasan politik. Kondisi ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi, karena menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat memberikan dampak negatif pada ekonomi suatu negara, seperti mengganggu produksi, perdagangan, investasi, dan konsumsi (Aisen & Veiga, 2017). Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, bisnis, dan kebijakan ekonomi suatu negara.



Sumber: *World Bank*

Gambar 1. 4
Stabilitas Politik 5 Negara ASEAN tahun 2010-2023 (dalam satuan persen)

Berdasarkan analisis stabilitas politik di lima negara pendiri ASEAN antara tahun 2010 hingga 2023, Singapura muncul sebagai negara dengan tingkat stabilitas

politik tertinggi. Hal ini mencerminkan kondisi politik yang relatif stabil di negara maju tersebut yang berbeda signifikan dengan kondisi politik di negara-negara berkembang di kawasan tersebut. Sementara itu, Indonesia, Thailand, dan Filipina menunjukkan tren yang lebih rendah dalam hal stabilitas politik selama periode yang sama, mencerminkan ketidakstabilan politik yang lebih besar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial mereka (Trading Economics, 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa Foreign Direct Investment (FDI) memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika didukung oleh kebijakan yang mendorong stabilitas politik dan kelembagaan yang kuat (Alfaro, 2017). Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, terutama jika diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Barro (2020), pengeluaran pemerintah hanya akan efektif jika dikelola secara efisien; jika berlebihan tanpa manajemen yang baik, justru dapat menimbulkan defisit anggaran dan inflasi.

Dalam konteks negara-negara ASEAN-5, stabilitas politik menjadi elemen penting yang mempengaruhi efektivitas pengeluaran pemerintah dan masuknya investasi asing. Negara dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi cenderung lebih mampu mengalokasikan anggaran secara efisien serta menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing. Sebaliknya, ketidakstabilan politik berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran, maraknya praktik korupsi, dan ketidakpastian kebijakan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Asnawi et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan temuan Busse dan Hefeker (2007) yang menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendorong masuknya FDI.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, stabilitas politik digunakan sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara FDI dan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi stabilitas politik yang tinggi, FDI dan pengeluaran pemerintah akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan (Yustia et al., 2024). Namun, jika stabilitas politik rendah, maka efek positif dari kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung melemah. Dengan demikian, peran stabilitas politik menjadi krusial dalam memastikan bahwa dampak FDI dan pengeluaran pemerintah dapat terealisasi secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan tujuan utama setiap negara dan keberhasilannya tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti FDI, pengeluaran pemerintah dan stabilitas politik. Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai hal tersebut masih sedikit yang menggunakan stabilitas politik sebagai variabel intervening, terkhusus pada kawasan ASEAN-5. Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda mengenai arah hubungan antar variabel. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “pengaruh *foreign direct investment* dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-5 dengan stabilitas politik sebagai variabel intervening periode 2010-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh FDI dan pengeluaran pemerintah terhadap stabilitas politik di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh FDI, pengeluaran pemerintah dan stabilitas politik secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023?
3. Bagaimana pengaruh FDI dan pengeluaran pemerintah simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023 melalui stabilitas politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh FDI, pengeluaran pemerintah dan stabilitas politik secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023;
2. Untuk mengetahui pengaruh FDI dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap stabilitas politik di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023;
3. Untuk mengetahui pengaruh FDI dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5 periode 2010-2023 melalui stabilitas politik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pengembangan ilmu, penelitian ini dapat memperkaya literatur ekonomi dengan memberikan bukti empiris mengenai interaksi dan kontribusi antar variabel terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5. Hal ini dapat membantu akademisi dan peneliti lain untuk mengembangkan teori-teori baru dan memperdalam pemahaman tentang proses pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN-5.
2. Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi melalui pemahaman mengenai peran dari FDI dan optimalisasi penggunaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mengidentifikasi prioritas dalam anggaran dan strategi penetapan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari situs resmi Badan Pusat Statistika Indonesia, *World Bank*, dan situs pendukung lainnya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan April 2025, dengan waktu penelitian terlampir.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																
4	Seminar Proposal Skripsi																
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																
6	Pengumpulan dan pengolahan data																
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi																
8	Ujian Skripsi, revisi Skripsi, dan pengesahan Skripsi																